

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dalam suatu negara berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara menyeluruh atau pada aspek tertentu. Pengaruh tersebut berhubungan dengan pola kehidupan baik dari sisi teknologi, sosial dan termasuk budaya yang akan sangat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara. Menurut Koentjaraningrat (2009) budaya merupakan perilaku, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dipunyai oleh manusia dengan belajar. Edward T. Hall (1973) juga mendefinisikan budaya sebagai jalan komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik karena budaya dapat dipahami dan disampaikan dengan berkomunikasi. Dalam budaya Indonesia sendiri terdapat macam keberagaman budaya yang telah mendarah daging. Tetapi kebudayaan tersebut seringkali di salah artikan jika sudah menyangkut prespektif gender yang berkembang dalam pola struktur masyarakat Indonesia sendiri.

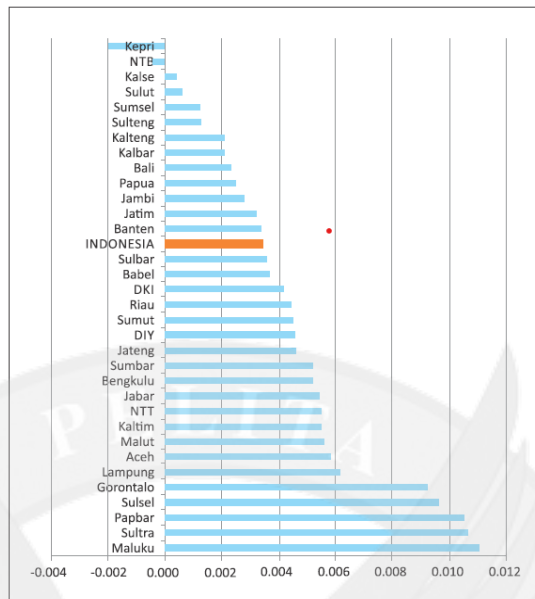
Dalam budaya tradisional, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi dibawah laki-laki. Secara tidak sadar hal ini biasanya dikonstruksikan oleh budaya setempat dalam pola beradaptasi di masyarakat dan hal itu menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Konstruksi budaya mempunyai peran yang penting dalam memposisikan peran gender perempuan dan laki-laki.

Gender adalah sebuah perbedaan jenis kelamin, wanita dan laki-laki yang kodratnya sejak awal telah memiliki perannya masing-masing sesuai dengan yang dikonstruksikan oleh budaya setempat sesuai dengan peran, sifat, kedudukan dan posisi dalam masyarakat tersebut (Hamid, 2003). Secara umum gender dideskripsikan dengan adanya feminim dan maskulin (Mosse, 1996). Pembagian peran ini menunjukkan posisi laki-laki sebagai peran produktif, publik, maskulin dan sebagai pencari nafkah. Berbeda dengan perempuan yang diposisikan sebagai reproduktif, domestik dan mencari nafkah tambahan (Fakih, 1997). Gender dan kodrat sering dikaitkan oleh masyarakat Indonesia sebagai seks atau jenis kelamin. Kodrat dalam gender merupakan pemberian mutlak dari Tuhan dan tidak bisa diganggu guat, seperti laki-laki memiliki penis atau buah zakar, mengalami mimpi basah, memproduksi sperma dan mengeluarkan dan perempuan memiliki vagina, mengandung, melahirkan bahkan menyusui, hal ini merupakan keadaan biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dan secara kodrat mereka berbeda satu sama lain. Secara alamiah, perbedaan ini bersifat tetap, tidak berubah dari waktu ke waktu dan tidak dapat bertukar fungsi satu dengan yang lainnya. Gender hanya merupakan perbedaan fungsi dan peran sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dari masyarakat, tercipta dari proses sosial budaya yang panjang sehingga dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya (Hereyah, 2012). Di era sekarang, budaya mengenai pembagian bias dalam gender ditentukan oleh masyarakat setempat seperti laki-laki yang menjadi dominan dalam berumah tangga ataupun diluar rumah dan perempuan yang berada di rumah untuk mengurus berbagai keperluan rumah tangga. Dominasi dari pihak laki-laki terlihat dalam budaya

patriarki sehingga terjadi adanya konstruksi sosial yang menyatakan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan tidak bisa disakiti, baik hati maupun fisiknya (Sakina dan Siti, 2017, h.71) padahal sebenarnya perempuan ataupun laki-laki bisa mempunyai posisi yang setara.

Di Indonesia, gender merupakan sebuah hal yang cukup sensitif. Banyaknya isu yang bermunculan dan sering disangkut pautkan dengan ketidakadilan terhadap kesetaraan gender sehingga sampai dengan saat ini masih diperjuangkan untuk perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia masih terlihat sangat nyata, terlebih berdasarkan data yang diambil dari BAPPENAS mengenai Indeks kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) tahun 2007 sampai 2010 adalah mereka mengaku bahwa pada nyatanya sekarang ini, perempuan dan anak perempuan masih mengalami tindakan ketidakadilan dan data yang mereka ambil diukur dari kesehatan reproduksi, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi, adanya keterwakilan dalam jabatan publik dan perlindungan terhadap kekerasan hanya sebesar 79,3%. Data dihitung dari 2007 dan 2010 dan pada data tersebut mengalami pertumbuhan secara lambat yang mengartikan bahwa isu gender dalam bentuk kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan merupakan suatu permasalahan yang bersifat sulit untuk diatasi tanpa adanya perlakuan yang serius.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Nilai IKKG 2007 – 2010 di 33 Provinsi di Indonesia.

Sumber: Buku IKKG dan IKPUG

Survei yang dilakukan oleh Women's Health and Life Experiences pada tahun 2016 dilansir oleh dw.com, perempuan berusia 15-64 tahun mengalami tindakan kekerasan fisik dan seksual. Tidak hanya itu, perempuan juga menghadapi rintangan hukum dan adanya diskriminasi dalam lapangan kerja. Keterlibatan perempuan masih dalam rate 51% pada tahun 2017 kalau dibandingkan dengan laki-laki sebesar 80%. Ini memaknai bahwa kasus kesetaraan gender dimana rendahnya partisipasi perempuan disebabkan diantaranya karena pernikahan, memiliki anak dan pendidikan yang rendah.

Adapun bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang telah terjadi terhadap wanita dilansir dari portal.axa.co.id yang pertama adalah tingginya perlakuan tindak kekerasan, banyaknya kasus yang mencatat bahwa wanita sering dijadikan sebagai objek kekerasan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Komnas

Perempuan pada tahun 2019 menjelaskan adanya kekerasan terhadap wanita sebanyak 431.471 kasus dan meningkat 792% dalam waktu 12 tahun kebelakang, ini terjadi karena adanya anggapan kekuasaan dan superioritas dalam diri laki-laki yang menempatkan standar lebih tinggi daripada wanita, biasanya ketika seorang istri tidak menaati perintah suami akan dikatakan durhaka sehingga terjadi kekerasan. Kedua adalah upah yang rendah, BPS dalam laporan perekonomian 2019 mencatat adanya kesenjangan upah laki-laki dan perempuan, selisih periode Februari 2019 mencapai Rp. 618,8 ribu. Ketiga adalah hak aset, dikutip dari CNN 3 Maret 2019 yang menulis bawah derajat perempuan tidak akan mencapai kesetaraan penuh sampai dengan tahun 2073, catatan dari Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 141 dari 187 negara dimana perempuan Indonesia hanya bisa menikmati 64,38% dari hak yang dinikmati oleh pria.

Dari beberapa hal tersebut dapat membuktikan bahwa perempuan hanya menjadi sosok yang lemah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih unggul dibanding laki-laki karena isu strata kedudukannya yang berada dibawah laki-laki. Beberapa hal itu membuktikan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender di dalam praktik hidup masyarakat Indonesia. Faktanya kesetaraan gender merupakan situasi dimana seharusnya perempuan dan laki-laki mempunyai status yang setara dan sebanding untuk hidup sebagaimana hak asasi dan potensi dalam membangun di kehidupan. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender (Mahfudhoh, 2017) dapat terlihat dalam pola marginalisasi perempuan, khususnya banyak terjadi dalam bidang ekonomi, seperti contohnya ketika peluang menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) lebih banyak perempuan, adanya pekerjaan yang menganggap

hanya perempuan saja yang mampu seperti guru TK, sekretaris atau perawat. Isu nyata mengenai marginalisasi perempuan dilansir dari nasional.kontan 7 Maret 2012 adalah di Karawang, Jawa Barat petani perempuan masih hidup miskin, dimana mereka hanya menjadi pemungut sisa hasil panen yang lingkungan sekitarnya bahkan mengira profesi itu 'bloon' tetapi mereka bekerja hanya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bentuk yang kedua adalah, subordinasi posisi laki-laki dianggap lebih penting atau yang pertama dibandingkan dengan laki-laki. Tidak sedikit di lingkungan sekitar yang membatasi ruang gerak perempuan, mereka berpendapat bahwa perempuan masih lemah, tidak mampu memimpin, dll. Ketiga adalah streatip yang menyangkut mengenai pelabelan tetapi bersifat negatif dan melahirkan ketidakadilan dalam struktur gender di Indonesia, seperti halnya tugas rumah tangga hanya untuk perempuan. Semua hal tersebut dapat terbentuk karena bersangkutan dengan sistem sosial patriarki dalam banyaknya domain keluarga di Indonesia.

Sistem patriarki di Indonesia sendiri diartikan bahwa kaum laki-laki adalah sosok yang paling mendominasi di dalam kebudayaan bermasyarakat sehingga seringkali terlihat adanya kesenjangan yang terjadi. Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) mengatakan bahwa partriarki diambil dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan segalanya. Hal ini menyebabkan standar perempuan diletakan pada posisi bawah atau rendah dibandingkan dengan laki-laki serta banyaknya pembatasan perlakuan oleh budaya partriarki yang tidak sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari seorang masyarakat di Indonesia. Budaya ini sudah tertanamkan sejak zaman

dahulu dimana perempuan diperlakukan tidak sebanding, seperti tidak mendapatkan harta warisan, dinikahkan sebelum usia pubertas dan tidak boleh memperoleh pendidikan kecuali perempuan itu berasal dari keluarga bangsawan. Budaya patriarki masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dengan tingginya arus globalisasi, budaya patriarki ini telah menyebar dari generasi ke generasi salah satunya penggambaran sistem budaya patriarki yang diperkuat melalui media massa.

Media massa adalah alat yang bisa digunakan dalam penyampaian pesan kepada khalayak (Cangara, 2002). Dalam penyampaian dan penyebaran pesan bisa dilakukan dengan bersamaan, langsung ke *audience* yang luas. Littlejohn mengatakan, biasanya digunakan dengan pemanfaatan menggunakan media, seperti melalui media elektronik (televisi, film, radio), cetak (surat kabar, majalah) dan akhir-akhir ini yang baru adalah dengan media online.

Media massa bisa menampung massa dalam jumlah yang besar dan luas (*university of reach*), sifatnya publik dan bisa dengan mudah untuk memberikan panggung kepada siapa penggunanya (McQuail, 2000). Terdapat salah satu komunikasi massa yang seringkali sebagai penyalur atau penggambaran mengenai kehidupan khususnya sosial yang ada disekitar masyarakat, yaitu lewat media film. Media komunikasi ini bersifat audio visual mempunyai tujuan agar pesan apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan kepada sekumpulan orang (Effendy, 1986, h.134). Dalam pemanfaatannya bisa dijadikan pembelajaran kepada masyarakat dan menarik perhatian orang selagi mempunyai alasan dasar bahwa suatu film mampu untuk mengantar pesan dengan cara yang unik.

Film dalam konteks komunikasi sendiri diciptakan bahwa ketika film sudah berproses dan diproduksi, maka makna dalam film akan menjadi sebuah proses komunikasi dikarenakan terdapat pesan yang ingin disampaikan dan makna yang ingin dibentuk. Hal tersebut bisa dilihat dalam bagan komunikasi pertama adanya *sender*, yang membuat film tersebut. Kemudian adanya *receiver*, yang ditujukan kepada masyarakat yang menonton film, lalu *Noise* akan ditemui ketika adanya kondisi tempat yang tidak nyaman. Film digunakan untuk merekam mengenai situasi yang ada di masyarakat dan kemudian dibuat projek ke dalam layar. Film biasanya diangkat dari gambaran atas realitas sosial yang sedang terjadi sehari-hari (Sobur, 2006). Sehingga ketika suatu hal dapat membentuk penggambaran terhadap fakta sosial yang ada atau sedang terjadi, disaat itulah masyarakat menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan apa yang sedang terjadi.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuat survei pada bulan Agustus sampai Desember 2019 mengenai perilaku yang menonton film di bioskop di Indonesia (Kumparan, 2020). Survei pertama melibatkan 1.220 koresponden berusia 17 tahun ke atas, yang tersebar di total 103 kabupaten dan kota di Indonesia. Dari survei yang dilakukan pada Agustus sampai September 2019, dibuktikan bahwa 9,3 persen orang Indonesia menonton film lokal, sementara 8,2% menonton film asing. Data terakhir dari filmindonesia.or.id pada tahun 2019 terdapat 15 film Indonesia yang mencapai satu juta penonton. Penelitian tersebut mengartikan bahwa film lokal sudah lebih memikat ketimbang film asing, tapi hanya 10 persen dari total populasi orang di Indonesia. Survei kedua pada bulan Desember 2019 membuktikan bahwa 67% orang lebih suka menonton film lokal

dan hanya 55 persen yang menonton film asing. Adapun berbagai film Indonesia yang memasuki Box Office. Salah satu film yang menduduki Box Office pada tahun 2019 adalah film Dua Garis Biru.

Peneliti melihat salah satu film Indonesia yang kental dengan isu ketidaksetaraan gender adalah film Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru merupakan drama remaja Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Gina S. Noer. Dilansir dari tribunnews.com film ini mampu meraih jumlah penonton sebanyak 2.538.473 ribu orang. Tayang pada 11 Juli 2019 diperankan oleh Angga Yunanda dan Zara Adhity. Film ini juga mengangkat tema mengenai kehamilan remaja atau pernikahan dini dan adanya kesetaraan gender yang terlihat. Hal ini selaras dengan penelitian Iska Noer (2018) bahwa dalam film Perempuan Berkalung Sorban ditulis oleh Gina S. Noer juga yang menampilkan ketidakadilan peran perempuan yang tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh bersekolah tinggi karena lebih baik mengurus rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Selain itu penelitian dari Dionni Ditya (2014) mengenai stereotip gender yang terdapat dalam film Anna Karenina yang menggambarkan peran, posisi dan pelabelan gender antara laki-laki dan perempuan yang sangat terlihat. laki-laki lebih kepada bekerja di pemerintahan sedangkan perempuan menjadi pekerja di dalam rumah.

Dari kasus dan penelitian terdahulu di atas peneliti memastikan secara nyata bahwa kasus mengenai ketidaksetaraan gender masih berkembang hingga saat ini dan sangat terlihat jelas terlebih yang ditampilkan dalam media massa, yaitu film. Salah satu fokus peneliti kali ini adalah membahas tentang konstruksi gender yang terdapat dalam film Dua Garis Biru (2019) dimana dalam beberapa adegan terdapat

adanya perlakuan tidak setara yang diposisikan kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki bahkan semenjak remaja. Hal tersebut didukung dan diperlihatkan melalui aturan yang berlaku di sebuah institusi pendidikan besar seperti sekolah, dimana dalam film *Dua Garis Biru* (2019) diperlihatkan bahwa remaja perempuan yang dikeluarkan dari sekolah karena diketahui hamil di luar nikah tetapi laki-laki masih tetap diperbolehkan menempuh pendidikan. Melihat hal ini, peneliti semakin tertarik untuk mengaitkannya dengan film *Dua Garis Biru* (2019) yang penuh akan ketidakadilan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dan bisa dilihat dapat memunculkan ketimpangan sosial karena memicu pemahaman konstruksi pemaknaan gender dalam masyarakat dimana posisi perempuan selalu ditempatkan dibawah laki-laki.

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu upaya dalam menanggapi adanya ketidaksetaraan gender ke dalam masyarakat adalah melalui film. Film mempunyai suatu kekuasaan yang mampu mendorong perspektif orang untuk sadar akan adanya isu ketidaksetaraan gender. Film-film Indonesia yang berbicara mengenai gender menurut Fimela.com adalah *Kartini* (2017) menceritakan mengenai kehidupan pahlawan wanita Indonesia R.A Kartini, perjuangan bagaimana wanita dipingit untuk menikah tetapi Kartini tetap belajar, membaca buku dan setelah menikahpun Kartini tetap tidak mau hak perempuan diinjak-injak. Film kedua adalah *Tiga Srikandi* (2016) menceritakan Tiga atlet perempuan Indonesia yang berhasil mempunyai kesempatan untuk meraih emas olimpiade pada Oktober 1988 di Seoul, Korea Selatan. Film ini lebih fokus kepada perjuangan sebelum olimpiade dimana terdapat

pertentangan batin sebelum menjadi perempuan hebat dalam olahraga. Film selanjutnya adalah film Athirah (2016) menceritakan perjuangan seorang Ibu dari Jusuf Kalla yang melawan suaminya karena ingin menikahi perempuan lain.

Pada tahun 2019 diproduksi film Dua Garis Biru yang mengangkat tema ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Film Dua Garis Biru banyak tersirat makna tidak adanya pola kesetaraan gender yang terlihat dari kasus dimana Dara, seorang anak kelas 3 SMA yang hamil di luar nikah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membuat malu tetapi dari pihak sekolahnya sendiri membiarkan Bima, yang menghamili Dara tetap menuntut ilmu pendidikan. Hal ini membuat orang tua dari pihak perempuan geram dan merasa tak adil. Tetapi dari orang tua Bima sendiri mengatakan bahwa jika Bima tidak mendapatkan pendidikan, bagaimana ia akan menjadi ayah di masa depan. Dari kasus ini bisa dilihat bagaimana perempuan seperti harus menanggung bebannya sendiri, ia dianggap kalau hamil diluar nikah memalukan nama baik sekolah sehingga tidak diperbolehkan padahal perempuan juga sama berhak untuk tetap berpendidikan meski dalam kondisi hamil.

Terbukti sekeluarnya film ini terdapat pro-kontra karena ada masyarakat yang menganggap film ini hanya sebagai ‘pembodohan’, ‘tidak mendidik’, dsb. Dilansir dari biem.co menyatakan pernyataan bahwa film Dua Garis Biru (2019) menimbulkan reaksi khalayak yang ramai, mulai dari *teaser* film yang melibatkan kontroversi sehingga menimbulkan aksi pemboikotan sampai petisi agar film ini dilarang tayang di bioskop karena dianggap mengangkat permasalahan yang tabu. Bahkan sebelum film ini tayang, petisi sudah banyak ditandatangani oleh warganet.

Dikutip dari popbela.com 15 Juli 2019, pembuat dari petisi ini menjelaskan bahwa film ini akan mudah menjerumuskan generasi muda serta menganggap bahwa bahwa hamil diluar menikah adalah sesuatu yang wajar, netizen yang menandatangani mengaku bahwa mereka hanya melihat trailersnya dan belum menonton filmnya.



Jangan Loloskan Film yang Menjerumuskan! Cegah Dua Garis Biru di Luar Nikah!

Gambar 1. 2 Petisi Film Dua Garis Biru dalam Change.org
Sumber: beautynesia.id

Disini terlihat bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang berbau tabu. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang mendukung film ini seperti adanya komentar atau *feedback* yang positif dari kalangan penulis.

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah utama sebagai berikut:

Bagaimana dekonstruksi gender pada film Dua Garis Biru (2019)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Peneliti ingin melihat penggambaran dekonstruksi gender pada film Dua Garis Biru (2019).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengembangan mengenai pengetahuan serta pemikiran khususnya bagi studi ilmu komunikasi dan menyangkut mengenai perfilman.

2) Manfaat sosial

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan masukan atas wawasan serta bahkan serta seluruh mahasiswa yang umumnya agar dapat digunakan untuk perkembangan ilmu komunikasi kedepannya. Serta dapat berguna bagi para pembuat film untuk lebih memperhatikan adanya pesan tersirat.

1.6 Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batas dalam permasalahan penelitian:

Penelitian ini hanya akan meneliti dari film Dua Garis Biru (2019) menceritakan mengenai perempuan dibawah umur yang hamil diluar nikah sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan gender ataupun perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Penelitian ini akan diteliti

menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills yang menentukan subjek dan objek aktor tokoh maupun pandangan penonton terhadap film tersebut. Fokus penelitian ini untuk melihat dekonstruksi gender yang terdapat dalam film Dua Garis Biru (2019).

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, dan batasan penelitian.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai subjek dan objek yang akan diteliti.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai penjelasan mengenai gambaran umum mengenai film, gender, ketidaksetaraan gender, analisis wacana Sara Mills.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, sumber data, unit analisis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari adegan film Dua Garis biru dan pembahasan terkait adanya konstruksi gender antara laki-laki dan perempuan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan beserta saran.

